

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

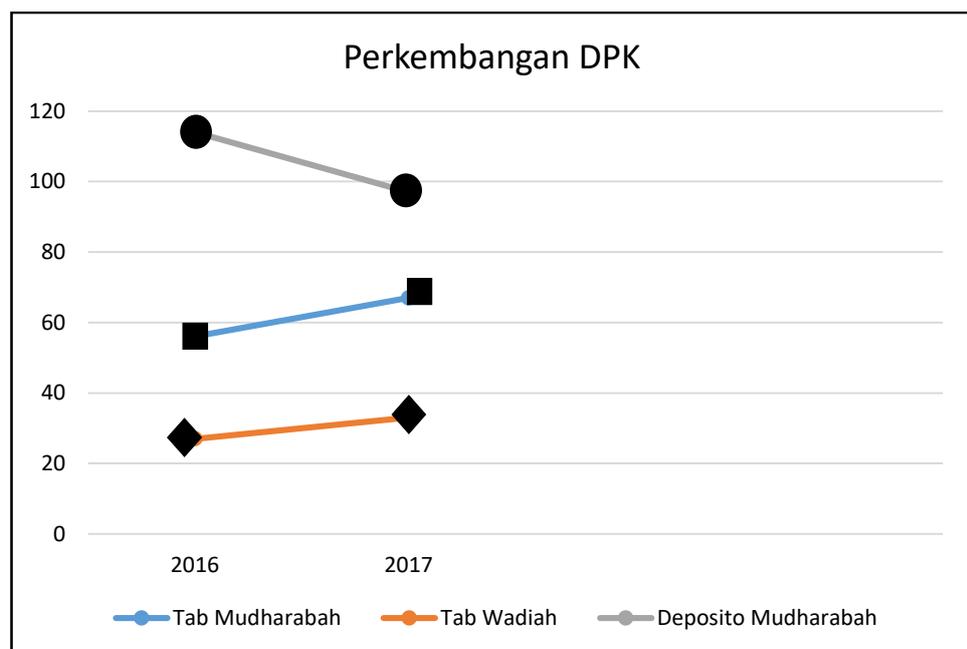
Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini terus membaik. Hal ini didukung dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berperilaku ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Hal ini berbanding lurus dengan munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Saat ini bank umum syariah banyak bermunculan baik di kota besar maupun kota kabupaten kecil. Tidak hanya bank umum syariah yang banyak bermunculan di Indonesia, koperasi syariah juga banyak tumbuh di Indonesia salah satunya yaitu berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) banyak sekali bertebaran koperasi syariah atau BMT yang terdiri dari koperasi syariah kecil dan besar hingga memiliki banyak kantor cabang di tiap kabupaten. Hal inilah yang harus selalu didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Perkembangan koperasi syariah atau BMT sangat membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil. Dengan adanya koperasi syariah atau BMT maka kesejahteraan anggota dan masyarakat dapat terjamin.

Perkembangan koperasi syariah atau BMT perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Pohan (2015), salah satu cara untuk mengembangkan koperasi syariah atau BMT yaitu dengan meningkatkan

kinerja keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), jumlah aset, biaya operasional dan pendapatan operasional lainnya.

Perkembangan koperasi syariah atau BMT yang dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat menunjukkan keadaan perkembangan koperasi syariah atau BMT secara jelas karena didukung oleh fungsi intermediasi di mana apabila penghimpunan dan penyaluran DPK meningkat maka koperasi syariah atau BMT tersebut berkembang. Berikut perkembangan DPK koperasi syariah atau BMT selama 2 tahun terakhir (2016-2017):



Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar.4.1 Komposisi DPK BMT

Keterangan:

- = Deposito Mudharabah
- = Tabungan Mudharabah
- ◇ = Tabungan Wadiah

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa komposisi DPK mengalami perubahan dari tahun 2016 sampai 2017. Hal ini dapat membuktikan bahwa jumlah DPK BMT berkembang. Pada tahun 2016, total tabungan mudharabah adalah 56 miliar, tabungan wadiah 27 miliar dan deposito mudharabah 1.114 miliar. Sedangkan di tahun 2017, total tabungan mudharabah adalah 67 miliar, tabungan wadiah 33 miliar dan deposito mudharabah 97 miliar.

Dari gambar grafik tersebut terlihat bahwa komposisi deposito mudharabah adalah yang paling banyak. Dari data laporan keuangan terlihat bahwa komposisi deposito mudharabah terdiri dari tabungan berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Hal inilah yang menyebabkan deposito mudharabah menjadi produk yang paling banyak nilainya karena jenis simpanan berjangkanya terdiri dari 3 jenis yang memungkinkan mitra dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan jangka waktu pengambilan. Selain itu deposito mudharabah juga merupakan produk yang apabila sudah lewat jatuh tempo pengambilan maka simpanan akan secara otomatis diperpanjang. Hal ini menyebabkan dana mitra dalam deposito mudharabah di BMT terus bertambah.

Selanjutnya komposisi tabungan mudharabah paling banyak ke dua. Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk simpanan yang dimiliki BMT untuk menghimpun dana mitra. Jumlah nilai produk ini cukup banyak kedua karena sistem akad mudharabah dinilai menguntungkan bagi pihak BMT maupun pihak mitra. Dalam akad ini, mitra menabung dananya

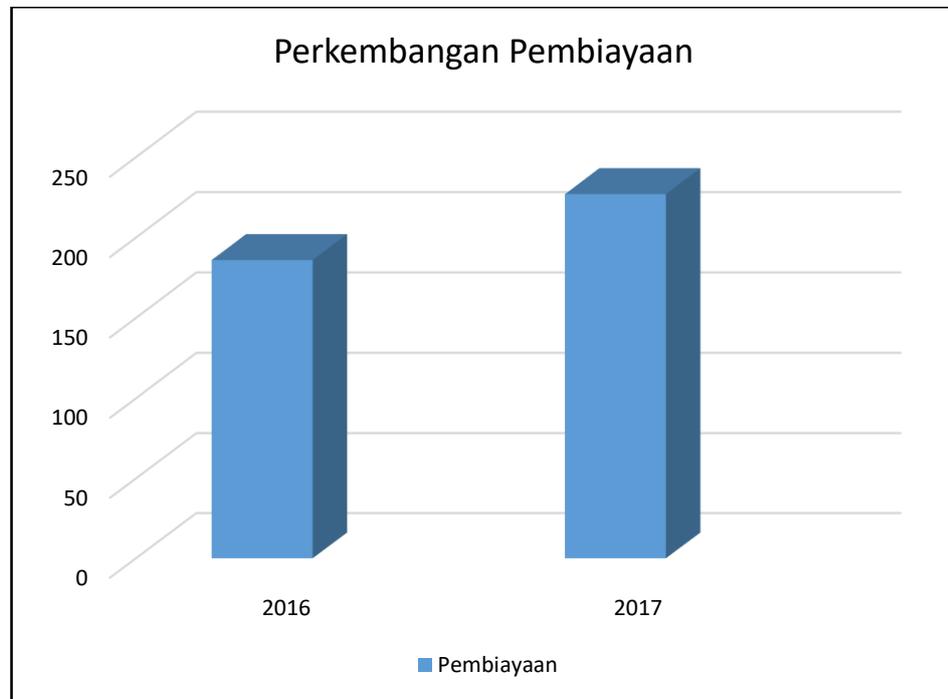
yang kemudian akan dikelola oleh pihak BMT. Hasil keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagikan sesuai kesepakatan. Hal ini dapat menarik mitra untuk menabung di BMT karena mitra akan mendapatkan bagi hasil.

Terakhir komposisi tabungan wadiah paling sedikit diantara yang lain. Hal ini disebabkan tidak semua BMT yang ada di Yogyakarta memiliki produk simpanan wadiah. Hal ini bisa jadi disebabkan karena simpanan wadiah kurang memberikan profit bagi pihak BMT di mana simpanan ini hanya bersifat titipan dan BMT harus memberikan bonus wadiah pada mitra. Oleh sebab itu banyak BMT yang ada di Yogyakarta lebih banyak fokus pada produk lain seperti deposito mudharabah dan simpanan muharabah karena lebih banyak memberikan profit.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah tabungan mudharabah dan tabungan wadiah mengalami kenaikan yang berarti bahwa mitra merasa akad tersebut lebih menguntungkan bagi mereka sehingga nilainya semakin meningkat. Sedangkan jumlah deposito mudharabah mengalami penurunan.

Selain komposisi DPK, perkembangan koperasi syariah atau BMT juga dapat dilihat dari komposisi pembiayaannya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pembiayaan dapat menunjukkan tingkat aktivitas koperasi syariah atau BMT dalam menyalurkan dananya dari pemilik dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Aktivitas BMT dalam menyalurkan dana merupakan hal yang perlu diperhatikan karena berkenaan dengan BMT

sebagai lembaga intermediasi yang memahami kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berikut komposisi dari pembiayaan BMT:



Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar.4.2 Komposisi Pembiayaan BMT

Perkembangan pembiayaan BMT yaitu selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pembiayaan berjumlah 186 miliar kemudian naik di tahun 2017 menjadi 227 miliar. Hal ini mengidentifikasikan bahwa BMT-BMT yang ada di Yogyakarta sudah cukup baik dalam perannya sebagai lembaga intermediasi sehingga jumlah pembiayaan dan penyaluran dana meningkat di tahun 2017.

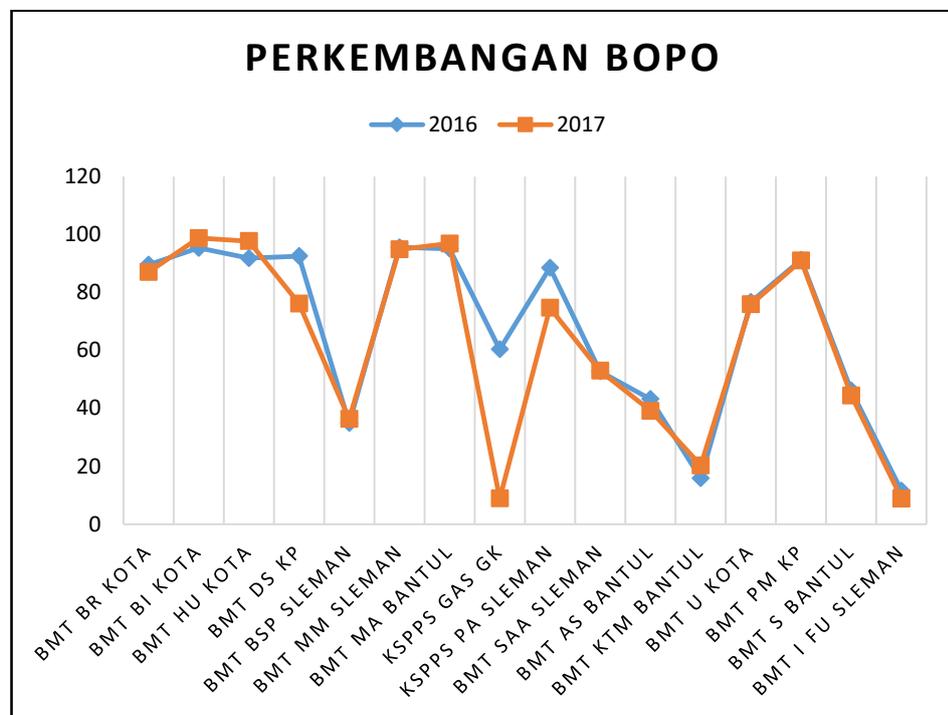
Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna', hawalah, kafalah, qardh, multijasa dan lain-lain. Tingkat pembiayaan yang meningkat disebabkan oleh pemasaran yang cukup baik dari BMT serta kesadaran masyarakat yang memilih melakukan pembiayaan lebih banyak di BMT daripada di bank umum lainnya.

Komposisi pembiayaan terdiri dari pembiayaan yang berbasis margin dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan berbasis margin adalah pembiayaan murabahah, qardh, salam dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan yang berbasis bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, multijasa dan lainnya. Komposisi pembiayaan margin pada BMT lebih tinggi dibanding pembiayaan bagi hasil. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan margin risikonya lebih kecil dibanding pembiayaan bagi hasil oleh karena itu ada beberapa BMT yang membatasi pembiayaan bagi hasilnya kepada mitra untuk mengurangi resiko kredit macet.

Selain itu, perkembangan BMT juga dapat dilihat dari nilai BOPO (biaya operasional dan pendapatan operasional). Dalam penilaian efisiensi semakin kecil nilai dari BOPO maka koperasi syariah atau BMT tersebut semakin efisien secara produksi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dengan biaya atau beban yang sedikit. Nilai BOPO didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Nilai BOPO berasal dari perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Berikut perkembangan BOPO koperasi syariah atau BMT di DIY:



Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar.4.3 Komposisi BOPO BMT

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa efisiensi BMT mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai 2017. Hal ini disebabkan oleh jumlah biaya operasional sangat besar sedangkan jumlah pendapatan operasional sangat kecil. Pada tahun 2016 BMT yang memiliki nilai BOPO

paling kecil adalah BMT I FU Sleman yaitu sebesar 11.5% sedangkan BMT yang memiliki nilai BOPO yang paling besar adalah BMT MM Sleman dengan nilai BOPO sebesar 95.5%. Pada tahun 2017 terdapat BMT yang memiliki nilai BOPO paling kecil yaitu BMT I FU Sleman dengan nilai 8.8% dan BMT yang memiliki nilai BOPO paling besar adalah BMT BI Kota dengan nilai 98.7%

Nilai BOPO pada laporan keuangan BMT rata-rata memiliki nilai yang sangat besar. Hal ini mengidentifikasikan bahwa BMT-BMT yang ada di Yogyakarta belum optimal dalam mengolah biaya operasional sehingga dapat menghasilkan pendapatan operasional yang optimal.

Terdapat 2 BMT yang memiliki nilai BOPO sangat kecil yaitu KSPPS GAS GK dan BMT I FU Sleman. Nilai biaya operasional BMT tersebut sangat kecil sedangkan nilai pendapatan operasional lainnya sangat besar. Pada dasarnya nilai BOPO yang kecil berarti bahwa BMT tersebut sangat baik kinerjanya namun apabila nilainya terlalu kecil dibanding nilai BPO pada bank umum atau BPRS maka muncul asumsi bahwa 2 BMT tersebut mungkin melakukan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan atau melakukan kecurangan.

Nilai rata-rata BOPO BMT di Yogyakarta selama tahun 2016 sampai dengan 2017 yaitu 67.5%. Hal yang perlu dilakukan agar BOPO BMT efisien adalah dengan menggunakan biaya operasional seoptimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan operasional lainnya yang optimal pula.

B. Pembahasan Tingkat Efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil

Penelitian ini meneliti 16 koperasi syariah atau BMT yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2016 sampai 2017. Hasil analisis DEA menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 4 BMT yang efisien dan 3 BMT yang efisien pada tahun 2017.

Tabel. 4.1 BMT yang memiliki kinerja keuangan efisien pada tahun 2016

ID	NAMA BMT	CRSTE	VRSTE	SCALE	Return to Scale
9	KSPPS PA Sleman	1	1	1	CRS
15	BMT S Bantul	1	1	1	CRS
16	BMT I FU Sleman	1	1	1	CRS

Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Tabel. 4.2 BMT yang memiliki kinerja keuangan efisien pada tahun 2017

ID	NAMA BMT	CRSTE	VRSTE	SCALE	Return to Scale
9	KSPPS PA Sleman	1	1	1	CRS
15	BMT S Bantul	1	1	1	CRS
16	BMT I FU Sleman	1	1	1	CRS

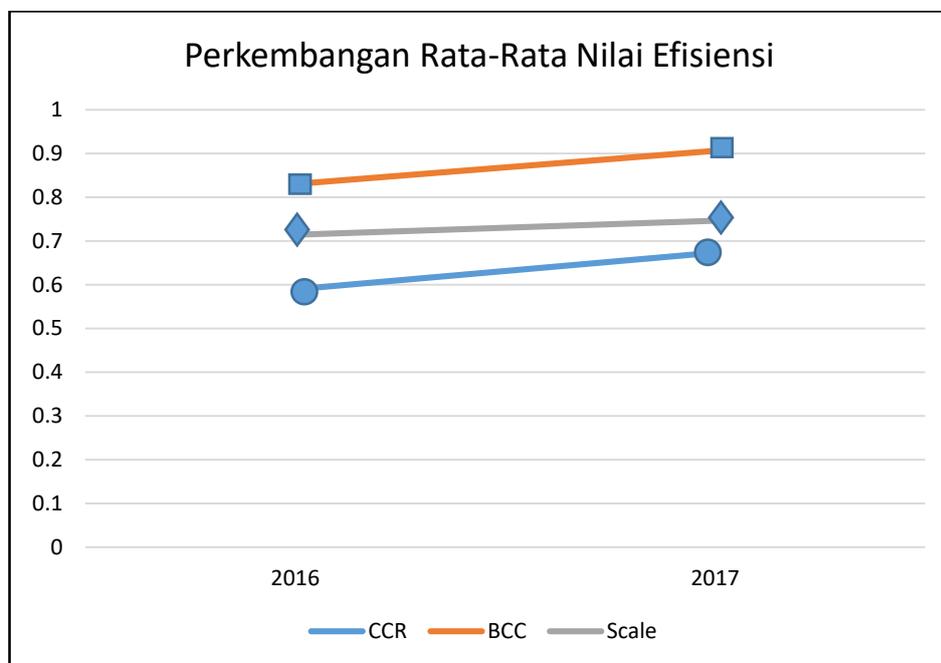
Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Dalam analisis DEA apabila koperasi syariah atau BMT memiliki nilai 1 berarti BMT tersebut memiliki kinerja keuangan yang efisien. Hal ini berarti bahwa koperasi syariah atau BMT tersebut telah mampu menyalurkan setiap *input* yang ada menjadi *output* yang optimal. Dalam pendekatan *output* terlihat bahwa koperasi syariah atau BMT tersebut dapat meningkatkan *output*nya tanpa harus menambah nilai *input*nya.

Berdasarkan hasil analisis DEA diketahui bahwa ada tiga koperasi syariah atau BMT yang sama-sama memiliki kinerja keuangannya efisien selama periode 2016 sampai 2017 yaitu KSPPS PA Sleman, BMT S Bantul, dan BMT I FU Sleman. Ke tiga koperasi syariah atau BMT tersebut konsisten memiliki nilai efisiensi dibandingkan koperasi syariah atau BMT lainnya.

Koperasi syariah atau BMT yang memiliki kinerja keuangan yang efisien berarti telah melakukan fungsi intermediasi yang optimal. Hal ini karena koperasi syariah atau BMT tersebut dapat menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*shohibul maal*) kepada pihak yang memerlukan dana (*mudharib*) dengan baik dan tepat. Koperasi syariah atau BMT menghimpun dananya melalui produk tabungan *mudharabah*, tabungan *wadiah* dan *deposito mudharabah*. Sedangkan koperasi syariah atau BMT dapat menyalurkannya melalui produk pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, sewa *ijarah*, pembiayaan *musyarakah*, jual beli *istishna*, *salam*, pinjaman *qardh* dan *multijasa*.

Sedangkan penyebab minimnya jumlah BMT yang tidak efisien bisa jadi disebabkan oleh banyak hal diantaranya persaingan antar BMT, persaingan antar BPRS atau bank umum syariah lainnya serta kurangnya manajemen yang professional bagi para pengelola BMT itu sendiri. Manajemen keuangan BMT yang tidak professional dapat menyebabkan BMT tersebut tidak efisien. Hal inilah yang harus BMT perbarui agar BMT tidak kalah bersaing.



Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar.4.4 Perkembangan Rata-Rata Nilai Efisiensi BMT

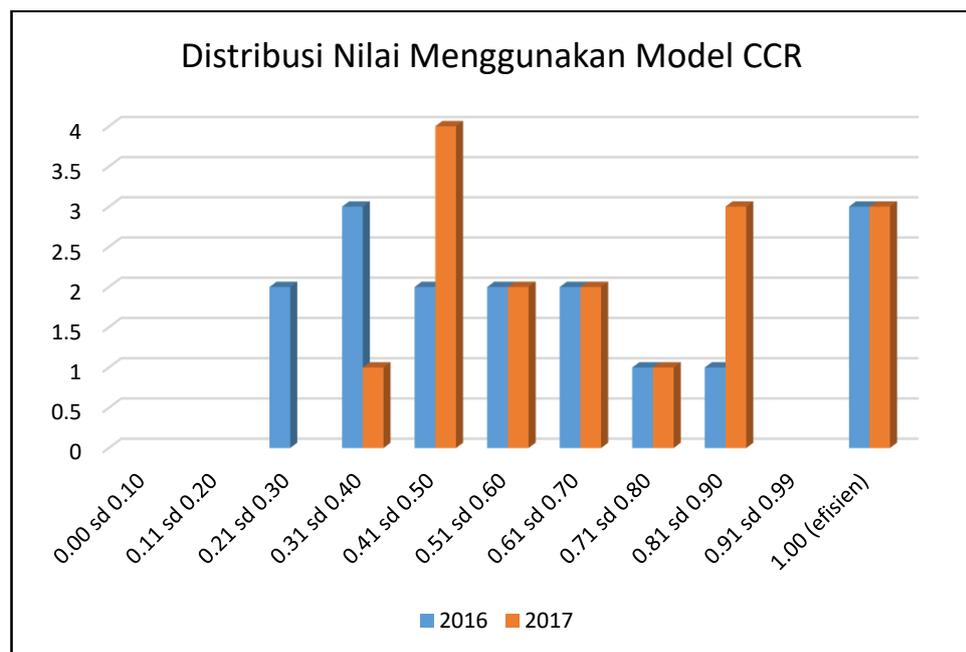
Keterangan:

○ = CCR

□ = BCC

◇ = Scale

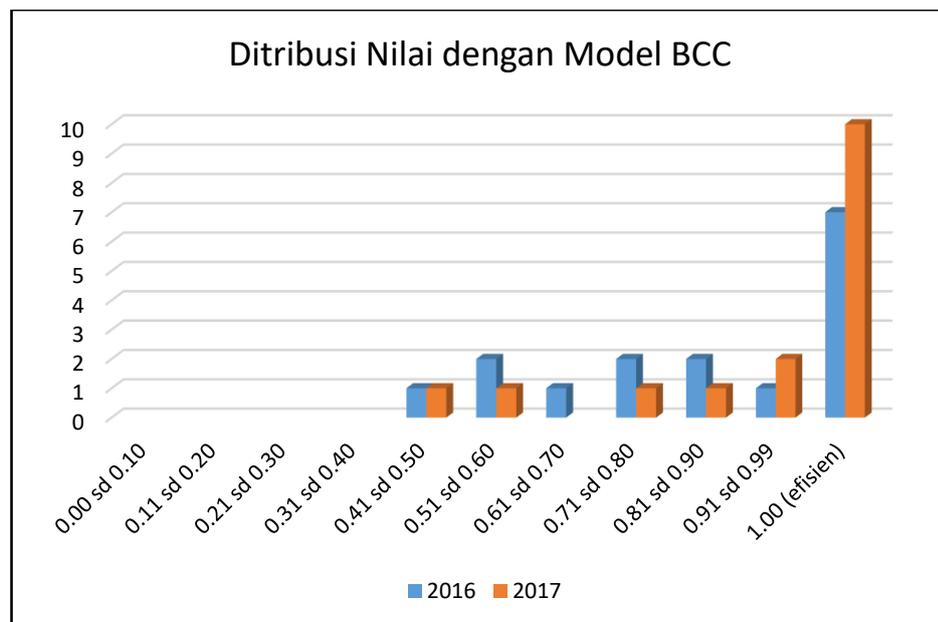
Berdasarkan gambar diatas, terbukti bahwa nilai rata-rata kinerja keuangan BMT belum efisien. Nilai rata-rata efisiensi CRSTE tahun 2016 sebesar 0.589 dan 0.673 di tahun 2017. Nilai rata-rata efisiensi VRSTE tahun 2016 adalah 0.830 dan tahun 2017 sebesar 0.906. Kemudian nilai rata-rata efisiensi Scale tahun 2016 sbesar 0.714 dan sebesar 0,746 pada tahun 2017. Di lihat dari gambar di atas bahwa nilai rata-rata efisiensi dengan model CCR, BCC dan Skala mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2017.



Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar.4.5 Distribusi nilai efisiensi menggunakan model CCR

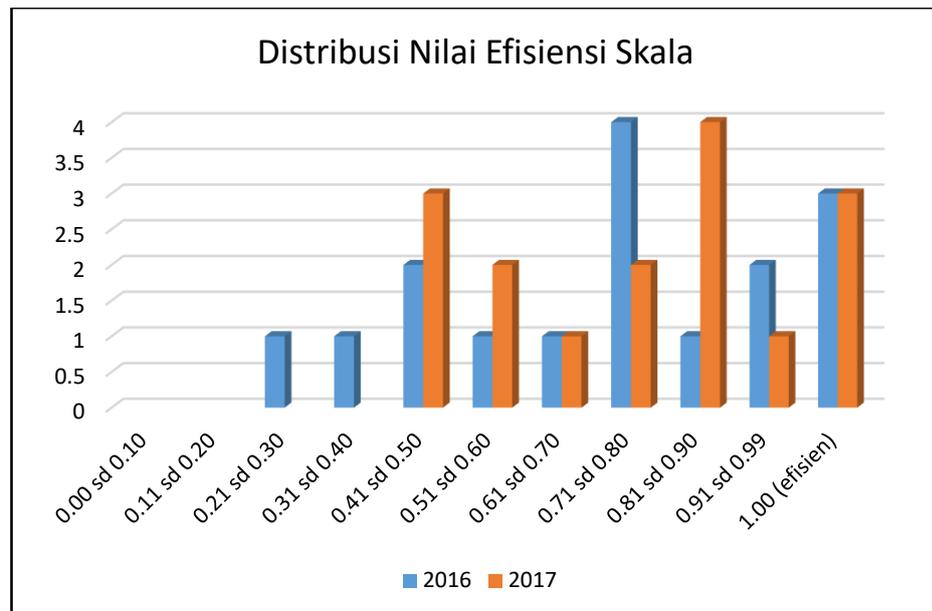
Pada gambar 4.5 diketahui bahwa perhitungan DEA dengan model CCR pada tahun 2016 sebagian besar BMT memiliki tingkat efisiensi pada rentang 0.31 sampai dengan 0.40 yaitu sebanyak 3 BMT diantaranya BMT HU Kota, BMT KTM Bantul dan BMT U Kota. Kemudian pada tingkat nilai efisiensi 1.00 yaitu terdapat 3 BMT diantaranya BMT S Bantul, KSPPS PA Sleman dan BMT I FU Sleman. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah BMT paling banyak berada pada rentang 0.41 sampai dengan 0.50 yaitu sebanyak 4 BMT diantaranya BMT HU Kota, BMT BI Kota, KSPPS GAS GK dan BMT KTM Bantul. Sedangkan jumlah BMT yang memiliki nilai efisiensi 1.000 hanya berjumlah 3 BMT di masing-masing tahun. Dari gambar tersebut terlihat bahwa setiap BMT memiliki nilai efisiensi yang berbeda-beda setiap tahunnya.



Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar.4.6 Distribusi nilai efisiensi menggunakan model BCC

Gambar diatas merupakan distribusi nilai efisiensi BMT menggunakan DEA dengan model BCC. Dalam gambar tersebut kita dapat lihat bahwa sebagian besar nilai efisiensi pada tahun 2016 adalah nilai 1.000 yang artinya efisien dengan jumlah 7 BMT diantaranya BMT BI Kota, BMT BSP Sleman, KSPPS GAS GK, BMT MA Bantul, KSPPS PA Sleman, BMT S Bantul dan BMT I FU Sleman. Namun ditahun 2017 jumlah tersebut naik menjadi 10 BMT di antaranya BMT BR Kota, BMT BI Kota, BMT SAA Sleman, KSPPS GAS GK, BMT MA Bantul, KSPPS PA Sleman, BMT U Kota, BMT PM KP, BMT S Bantul dan BMT I FU Sleman. Hal ini berbeda dengan model CCR di mana nilai efisiensi 1.000 dari tahun 2016 dan 2017 sama-sama berjumlah 3 BMT sedangkan pada model BCC pada tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah BMT yang memiliki nilai efisien.

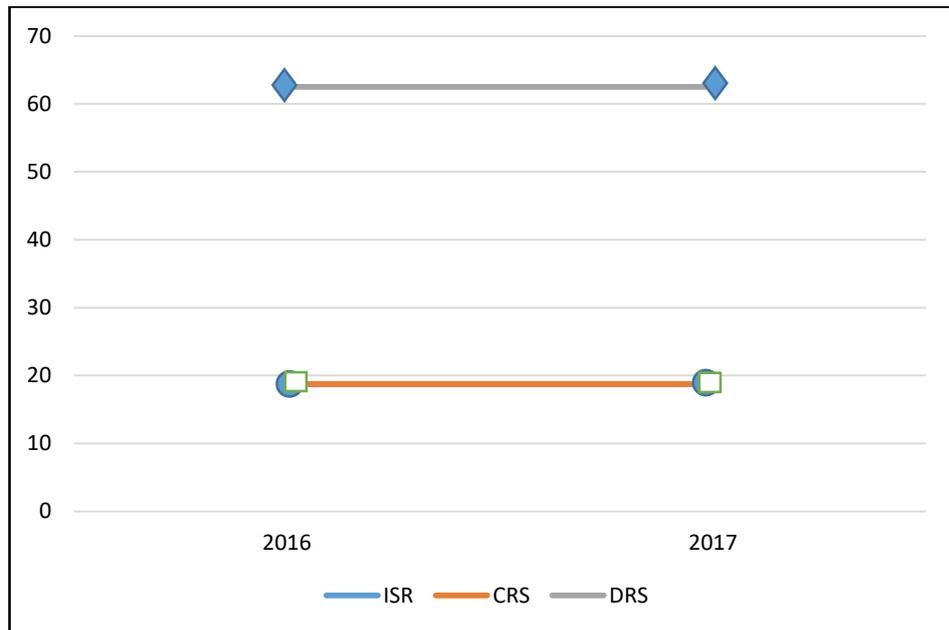


Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar.4.7 Distribusi nilai efisiensi skala

Berdasarkan hasil dari perhitungan efisiensi skala, terlihat bahwa trend distribusi konsentrasi nilai efisiensi BMT berubah-ubah. Jumlah BMT paling banyak pada tahun 2016 terdapat pada rentang nilai 0.71 sampai dengan 0.80 sejumlah 4 BMT di antaranya BMT BSP Sleman, BMT SAA Sleman, BMT AS Bantul dan BMT KTM Bantul. Sedangkan jumlah BMT paling banyak pada tahun 2017 terdapat pada rentang 0.81 sampai dengan 0.90 yaitu 4 BMT di antaranya BMT MM Sleman, BMT MA Bantul, BMT U Kota dan BMT PM KP.

Perbedaan jumlah BMT yang efisien pada masing-masing model DEA disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi model tersebut. Dalam model CCR dengan asumsi CRS, BMT diasumsikan berada pada kondisi optimal tanpa adanya perhitungan factor eksternal lainnya. Sedangkan pada model BCC dengan asumsi VRS, BMT diasumsikan berada pada kondisi yang tidak optimal di mana BMT dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti persaingan antar BMT, kurang optimalnya manajemen, regulasi pemerintah dan lain-lain. Namun asumsi skala mengindikasikan efisiensi dengan cara menyeluruh dengan memberikan informasi skala efisiensi setiap BMT. Menurunnya efisiensi skala menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi menyeluruh atau *overall*.



Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar.4.8 Distribusi Skala Efisiensi BMT

Keterangan:

○ = IRS

□ = CRS

◇ = DRS

Efisiensi skala didapat dari perbandingan hasil nilai efisiensi pada asumsi CRS dengan nilai efisiensi pada asumsi VRS. Berdasarkan hasil perhitungan DEA yang disajikan dalam gambar 4.8 terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 jumlah BMT dengan skala IRS (*Increasing Return to Scale*) mengalami keadaan yang konstan senilai 18.75%. Sama halnya dengan IRS, pada skala CRS (*Constan Return to Scale*) mengalami keadaan tetap pula dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu senilai 18.75%. Sedangkan pada skala DRS (*Decreasing Return to Scale*)

memiliki nilai konstan juga dari tahun 2016 sampai dengan 2017 yaitu senilai 62.5%.

BMT yang mengalami kondisi DRS mengindikasikan bahwa BMT tersebut harus mengurangi jumlah *input* karena jumlah *input* yang telah dicapai sudah tidak sesuai dengan jumlah *output* yang telah disajikan. Sedangkan BMT yang mengalami kondisi IRS maka BMT tersebut mengindikasikan bahwa BMT tersebut harus meningkatkan kapasitas *outputnya* namun tetap harus mempertahankan jumlah *input* yang ada. Apabila BMT mengalami kondisi skala CRS maka BMT tersebut sudah efisien secara skala.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi BMT yang sudah efisien cukup rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan yang paling banyak adalah BMT dengan kondisi skala DRS (*Decreasing Return to Scale*) yang berarti BMT harus mengurangi jumlah *input* agar dapat mencapai *output* yang optimal.

C. Reference Set Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Hendri (2013:336) menjelaskan bahwa salah satu manfaat perhitungan efisiensi menggunakan DEA adalah dapat mengelompokkan DMU-DMU yang efisien maupun tidak efisien berdasarkan perhitungan sintesis, DMU yang efisien maupun yang tidak efisien akan terlihat melalui seringnya frekuensi DMU tersebut menjadi rujukan DMU lainnya.

Sekumpulan BMT yang ditentukan sebagai DMU yang efisien akan menjadi *reference* (rujukan) bagi sekumpulan BMT lain yang tidak efisien. Berikut *reference set* dari BMT di DIY:

Tabel 4.3 *Reference Set* BMT

2016			2017		
ID	BMT	Fq	ID	BMT	Fq
2	BMT BI Kota	3	1	BMT BR Kota	1
5	BMT BSP Sleman	5	2	BMT BI Kota	1
7	BMT MA Bantul	3	7	BMT MA Bantul	2
8	KSPPS GAS GK	2	8	KSPPS GAS GK	5
9	KSPPS PA Sleman	10	9	KSPPS PA Sleman	6
15	BMT S Bantul	7	10	BMT SAA Sleman	1
16	BMT I FU Sleman	4	13	BMT U Kota	5
			14	BMT PM KP	2
			15	BMT S Bantul	6
			16	BMT I FU Sleman	3

Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Pada hasil perhitungan DEA pada laporan keuangan BMT tahun 2016 diketahui bahwa terdapat 7 BMT yang dapat menjadi rujukan BMT lain yang belum mencapai nilai efisien. BMT yang paling banyak dirujuk adalah KSPPS PA Sleman yang dirujuk oleh 10 BMT lain. Dalam penelitian ini KSPPS PA Sleman telah memiliki kinerja yang efisien selama tahun 2016-2017.

Kemudian pada tahun 2017 terdapat 10 BMT yang dapat dijadikan rujukan BMT lainnya. BMT yang paling banyak dirujuk adalah KSPPS PA

Sleman dan BMT S Bantul. BMT yang belum efisien dapat merujuk kepada BMT yang telah efisien. Berikut ini referensi masing-masing BMT:

Tabel 4.4 Rekap rujukan BMT 2016

ID	BMT	Referensi BMT (ID)			
1	BMT BR Kota	2	9		
2	BMT BI Kota	2			
3	BMT HU Kota	5	9	16	15
4	BMT DS KP	5	9	15	
5	BMT BSP Sleman	5			
6	BMT MM Sleman	15	9	16	7
7	BMT MA Bantul	7			
8	KSPPS GAS GK	8			
9	KSPPS PA Sleman	9			
10	BMT SAA Sleman	15	9		
11	BMT AS Bantul	5	8	9	
12	BMT KTM Bantul	5	15	9	
13	BMT U Kota	2	9		
14	BMT PM KP	15	9	16	7
15	BMT S Bantul	15			
16	BMT I FU Sleman	16			

Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Tabel 4.5 Rekap rujukan BMT 2017

ID	BMT	Referensi BMT (ID)			
1	BMT BR Kota	1			
2	BMT BIF	2			
3	BMT HU Kota	16	9	13	15
4	BMT DS KP	8	15	13	
5	BMT BSP Sleman	8	9	13	15
6	BMT MM Sleman	16	9	7	14
7	BMT MA Bantul	7			
8	KSPPS GAS GK	8			
9	KSPPS PA Sleman	9			
10	BMT SAA Sleman	10			
11	BMT AS Bantul	8	9	15	
12	BMT KTM Bantul	15	8	9	13
13	BMT U Kota	13			
14	BMT PM KP	14			
15	BMT S Bantul	15			
16	BMT I FU Sleman	16			

Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

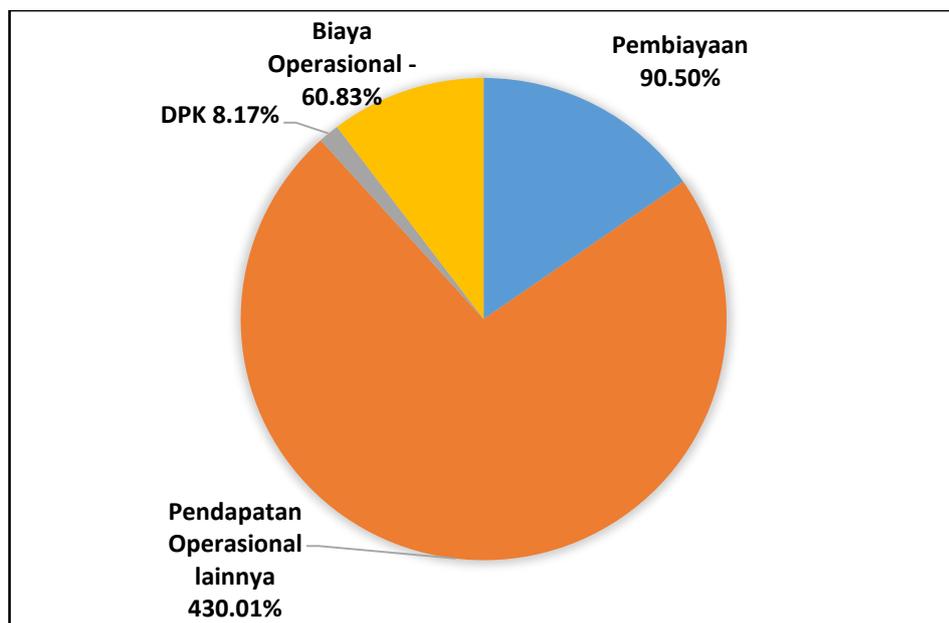
Berdasarkan tabel 4.4 dan tabel 4.5, diketahui bahwa masing-masing BMT memiliki rujukan yang berbeda-beda. Istilah ID dalam tabel tersebut merupakan nomor BMT dalam penelitian ini agar lebih mudah dalam memahami. BMT yang menjadi rujukan disajikan dalam bentuk nomor ID BMT.

BMT yang memiliki nomor ID yang sama dengan referensinya berarti BMT tersebut sudah mencapai efisiensi kinerja keuangan. Contohnya yaitu BMT Sehati memiliki ID 15, kemudian memiliki referensi ID BMT 15 juga berarti BMT Sehati telah mencapai efisiensi kinerja keuangan. Begitu pula apabila BMT I FU Sleman memiliki ID 16 dan nilai referensinya 16 berarti BMT tersebut sudah mencapai efisiensi.

Sebuah BMT bisa memiliki rujukan lebih dari satu. Oleh karena itu dalam tabel di atas terdapat beberapa BMT yang memiliki satu sampai 4 BMT lain sebagai referensi atau rujukan untuk mencapai nilai efisien. Perhitungan efisiensi menggunakan analisis DEA sangat cocok untuk mengukur nilai efisiensi dengan penjabaran yang lengkap dan menjelaskan DMU-DMU mana saja yang dijadikan rujukan atau referensi DMU lain yang belum efisien sehingga praktisi BMT dan peneliti dapat mengevaluasi kinerja keuangan BMT.

D. Potensi Pengembangan Batul Maal Wa Tamwil (BMT)

Dalam mengembangkan potensi yang harus dilakukan adalah menganalisa out dan *input* BMT yang akan mendukung peningkatan efisiensi BMT. Berikut hasil analisis potensi pengembangan BMT berdasarkan tahun 2016 dengan model CCR:

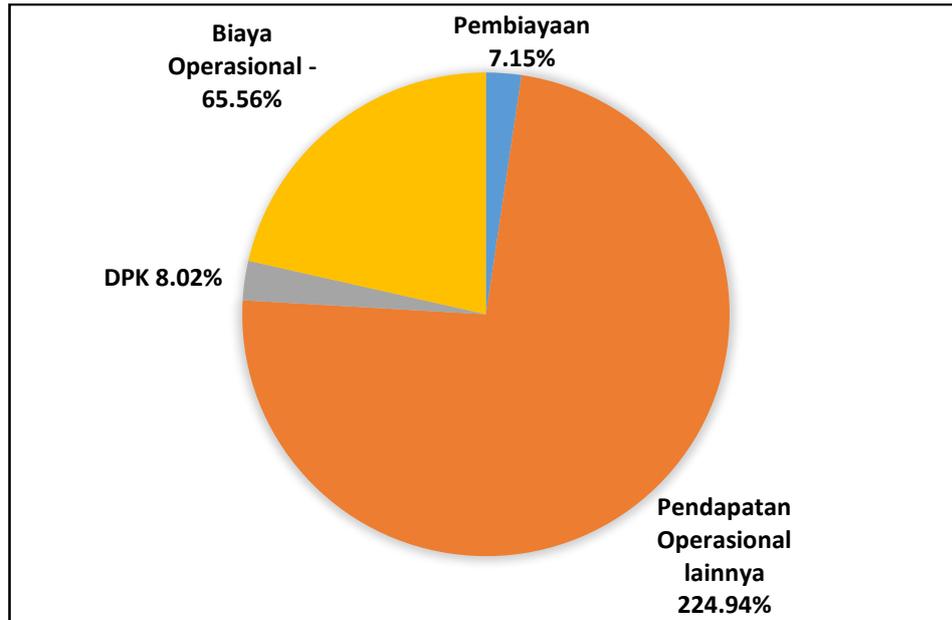


Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar 4.9 Potensi Pengembangan BMT 2016 (Model CCR)

Berdasarkan hasil analisis model CCR, diketahui bahwa kontribusi paling besar dalam meningkatkan potensi BMT adalah pendapatan operasional lainnya dengan jumlah sebesar 430.01%, *output* lain yang bisa ditingkatkan adalah pembiayaan sebesar 90.50%. Kemudian variabel *input* potensi yang bisa ditingkatkan adalah DPK sebesar 8.17% serta biaya operasional yang bisa diturunkan sebesar -60.83%.

Berikut hasil analisis potensi pengembangan BMT berdasarkan tahun 2016 dengan model BCC:

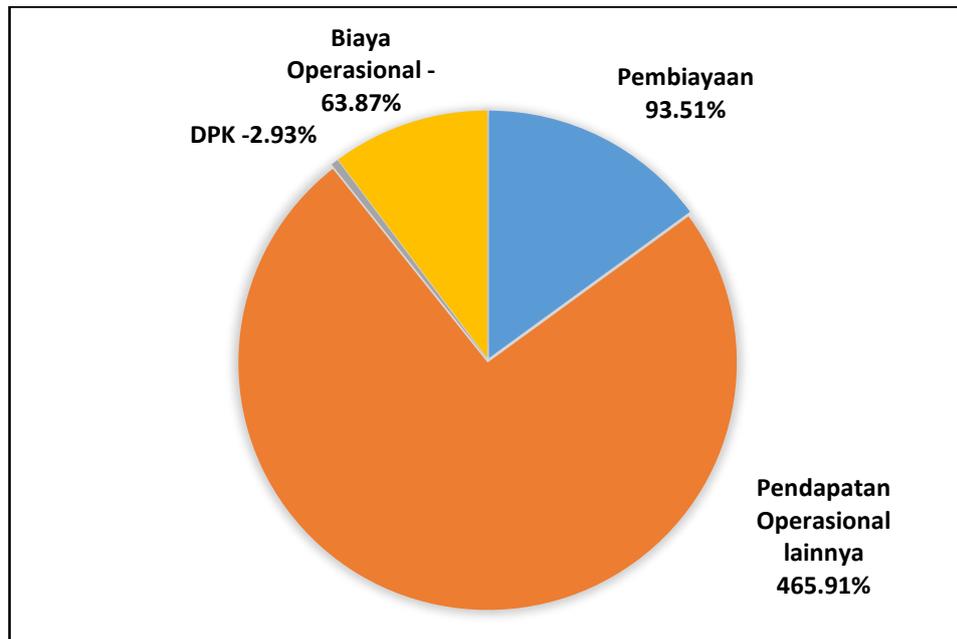


Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar 4.10 Potensi Pengembangan BMT 2016 (Model BCC)

Berdasarkan hasil analisis model BCC, diketahui bahwa kontribusi paling besar dalam meningkatkan potensi BMT adalah pendapatan operasional lainnya sebesar 224.94%. Sedangkan variabel *output* lainnya yang dapat ditingkatkan yaitu pembiayaan sebesar 7.15%. Kemudian variabel *input* potensi yang bisa ditingkatkan adalah DPK sebesar 8.02% serta biaya operasional yang bisa diturunkan sebesar -65.56%.

Berikut hasil analisis potensi pengembangan BMT berdasarkan tahun 2017 dengan model CCR:

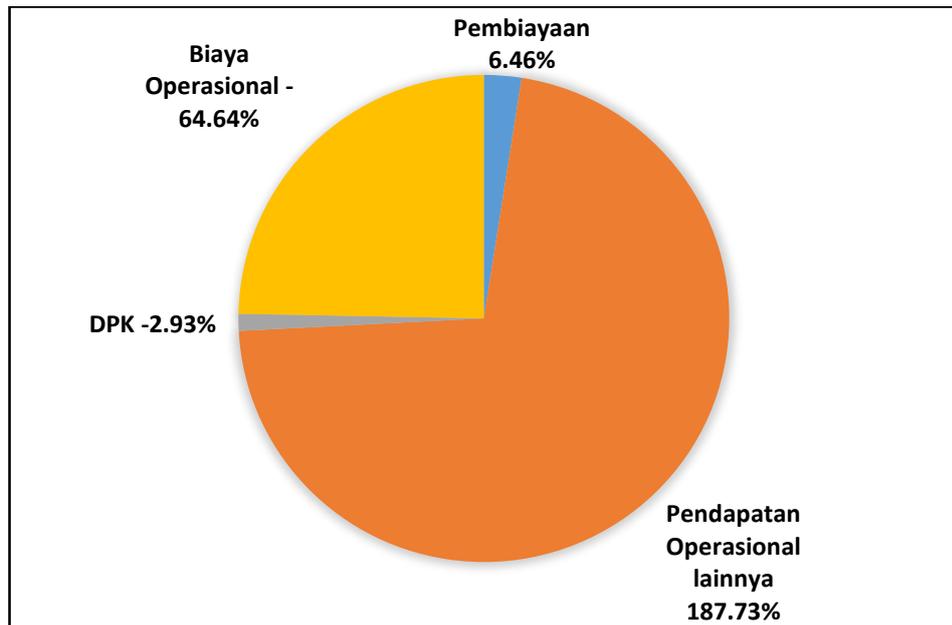


Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar 4.11 Potensi Pengembangan BMT 2017 (Model CCR)

Berdasarkan hasil analisis model CCR, diketahui bahwa kontribusi paling besar dalam meningkatkan potensi BMT adalah pendapatan operasional lainnya dengan jumlah sebesar 465.91%, *output* lain yang bisa ditingkatkan adalah pembiayaan sebesar 93.51%. Kemudian variabel *input* yang bisa dikurangi adalah DPK sebesar -2.93% serta biaya operasional yang bisa diturunkan sebesar -63.87%.

Berikut hasil analisis potensi pengembangan BMT berdasarkan tahun 2017 dengan model BCC:



Sumber: Dinas Koperasi DIY (diolah)

Gambar 4.12 Potensi Pengembangan BMT 2017 (Model BCC)

Berdasarkan hasil analisis model BCC, diketahui bahwa kontribusi paling besar dalam meningkatkan potensi BMT adalah pendapatan operasional lainnya sebesar 187.73%. Sedangkan variabel *output* lainnya yang dapat ditingkatkan yaitu pembiayaan sebesar 6.46%. Kemudian variabel *input* yang bisa dikurangi adalah DPK sebesar -2.93% serta biaya operasional yang bisa diturunkan sebesar -64.64%. Berikut deskripsi dari potensi pengembangan BMT:

1. Potensi Pengembangan *Output*

Dari hasil analisis potensi pengembangan output terlihat bahwa variabel pendapatan operasional lainnya mempunyai potensi pengembangan paling besar untuk meningkatkan efisiensi. Nilai potensi pengembangan model CCR 2016 yaitu 430.01% dan pada

tahun 2017 senilai 465.91%. Sedangkan pada model BCC pengembangan tahun 2016 senilai 224.94% dan pada tahun 2017 senilai 187.73%. Nilai itu menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai efisien, *output* pendapatan operasional lainnya harus ditingkatkan sebesar 224.94% - 430.01% dari nilai rata-rata pendapatan operasional lainnya per tahun.

Nilai potensi pengembangan variabel *output* pembiayaan dengan model CCR 2016 yaitu 90.50% sedangkan pada tahun 2017 senilai 93.51%. Kemudian nilai potensi pengembangan model BCC tahun 2016 yaitu 7.15% dan pada tahun 2017 senilai 6.46%. Nilai itu menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai efisien, *output* pembiayaan tahun 2016 harus ditingkatkan sebesar 7.15% - 90.50% dan pada tahun 2017 harus ditingkatkan sebesar 6.46% - 93.51%.

2. Potensi Pengembangan *Input*

Potensi pengembangan variabel *input* DPK dengan model CCR tahun 2016 menunjukkan nilai 8.17% dan pada tahun 2017 sebesar -2.93%. Nilai itu menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai efisien dengan model CCR, *input* DPK tahun 2016 harus ditingkatkan sebesar 8.17% dan pada tahun 2017 dikurangi sebesar -2.93%.

Sedangkan pada tahun 2016 dengan model BCC menunjukkan nilai 8.02% dan pada tahun 2017 sebesar -2.93%. Nilai itu menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai efisien dengan model BCC, maka *input* DPK tahun 2016 harus ditingkatkan sebesar 8.02% dan pada tahun 2017 dikurangi sebesar -2.93%.

Potensi pengembangan variabel *input* biaya operasional dengan model CCR tahun 2016 menunjukkan nilai -60.83% dan pada tahun 2017 sebesar -63.87%. Nilai itu menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai efisien dengan model CCR, *input* biaya operasional tahun 2016 harus dikurangi sebesar -60.83% dan pada tahun 2017 dikurangi sebesar -63.87%.

Sedangkan pada tahun 2016 dengan model BCC menunjukkan nilai -65.56% dan pada tahun 2017 sebesar -64.64%. Nilai itu menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai efisien dengan model BCC, maka *input* biaya operasional pada tahun 2016 harus dikurangi sebesar -65.56% dan pada tahun 2017 dikurangi sebesar -64.64%.